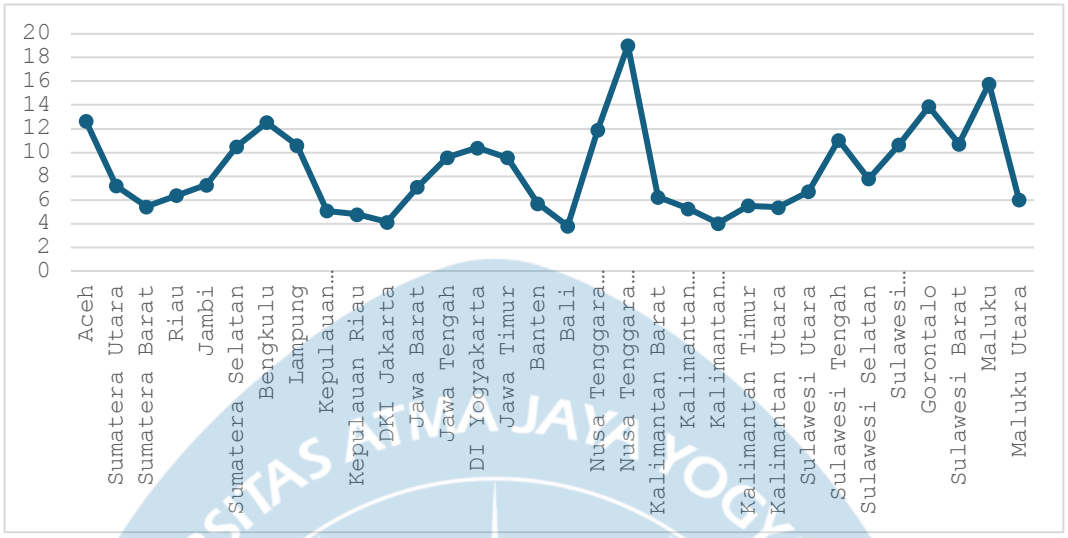
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, serta pengurangan kemiskinan. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingginya laju pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan suatu daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan adalah tingkat kemiskinan. Todaro dan Smith (2020) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi yang berhasil ditandai dengan menurunnya tingkat kemiskinan, berkurangnya ketimpangan pendapatan, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga mencerminkan keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan sumber daya ekonomi lainnya. Sen (1981) menyatakan bahwa kemiskinan terjadi ketika individu tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar dan memperoleh akses terhadap berbagai peluang ekonomi. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Untuk melihat kondisi kemiskinan antarprovinsi di Indonesia, disajikan tingkat kemiskinan pada 32 provinsi tahun 2024 sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar1. 1
Presentase Angka Kemiskinan 32 provinsi di Indonesia pada tahun 2024

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin pada September 2024 tercatat sebesar 8,57%, menurun sebesar 0,46 poin persentase dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 9,03%. Sejalan dengan itu, jumlah penduduk miskin juga menurun menjadi 24,06 juta jiwa, atau berkurang sekitar 1,16 juta jiwa dibandingkan Maret 2024. Penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat, meskipun upaya pengentasan kemiskinan masih perlu terus dilakukan mengingat jumlah penduduk miskin yang masih relatif besar dan masih terdapat kesenjangan tingkat kemiskinan antara wilayah perkotaan dan perdesaan.

Berdasarkan Gambar 1.1, tingkat kemiskinan pada 32 provinsi di Indonesia tahun 2024 menunjukkan adanya perbedaan yang cukup besar antarwilayah. Secara umum, terlihat bahwa tingkat kemiskinan antarprovinsi bervariasi cukup besar. Provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi adalah Nusa Tenggara Timur (NTT)

dengan nilai 19,02%. Tingginya tingkat kemiskinan di NTT menunjukkan bahwa hampir satu dari lima penduduk di provinsi tersebut masih berada di bawah garis kemiskinan. Selain NTT, provinsi lain yang memiliki tingkat kemiskinan relatif tinggi adalah Maluku dengan nilai 15,78%, Gorontalo dengan nilai 13,87%, Aceh dengan nilai 12,64%, Bengkulu dengan 12,52%, dan Nusa Tenggara Barat dengan nilai 11,91%. Tingginya tingkat kemiskinan di provinsi-provinsi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak meskipun berbagai program pembangunan dan pengentasan kemiskinan telah dilaksanakan oleh pemerintah.

Sementara itu, beberapa provinsi menunjukkan tingkat kemiskinan yang relatif rendah. Bali menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah sebesar 3,8%, diikuti Kalimantan Selatan sebesar 4,02%, DKI Jakarta sebesar 4,14%, Kalimantan Tengah sebesar 4,32%, Kepulauan Riau sebesar 4,98%, serta Kepulauan Bangka Belitung sebesar 5,08%. Rendahnya tingkat kemiskinan di wilayah tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi, kesempatan kerja, serta akses masyarakat terhadap pendidikan dan pelayanan publik relatif lebih baik dibandingkan daerah lainnya.

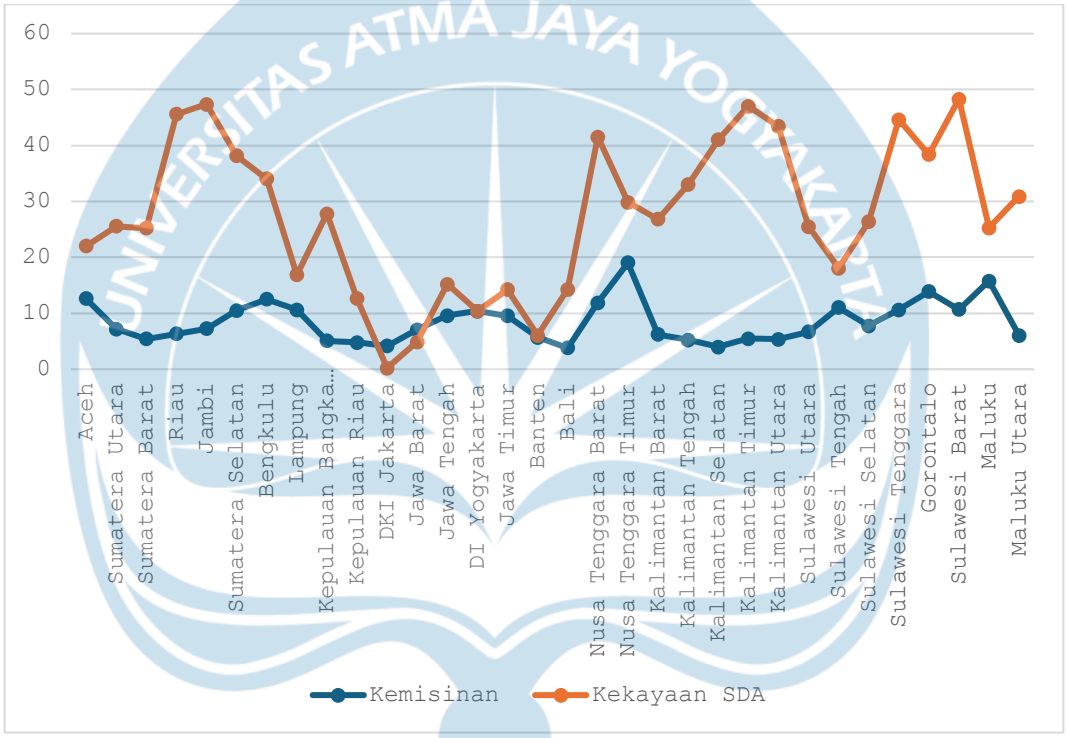
Secara umum, sebagian besar provinsi di Indonesia memiliki tingkat kemiskinan pada kisaran 5% hingga 11%. Namun demikian, terdapat kesenjangan yang cukup besar antara provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi dan terendah. Selisih tingkat kemiskinan antara Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi dan Bali sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah mencapai sekitar 15,07 poin persentase. Kondisi tersebut menunjukkan

bahwa hasil pembangunan ekonomi di Indonesia belum sepenuhnya merata antarwilayah.

Perbedaan tingkat kemiskinan antar provinsi tersebut mengindikasikan bahwa terdapat berbagai faktor yang memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Beberapa provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi ternyata juga memiliki potensi sumber daya alam yang besar, seperti Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Nusa Tenggara Barat. Di sisi lain, terdapat provinsi dengan tingkat kemiskinan rendah yang didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang lebih baik, aktivitas ekonomi yang lebih berkembang, serta efektivitas kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan daerah. Fenomena ini menunjukkan bahwa kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, melainkan merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor ekonomi dan sosial. Todaro dan Smith (2020) mengatakan bahwa sumber daya alam merupakan salah satu faktor produksi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi apabila dikelola secara efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2024), sektor pertanian serta sektor pertambangan dan penggalian masih menjadi sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Pada tahun 2024, sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 13,07 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, sedangkan sektor pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi sebesar 9,15 persen. Menurut Badan Pusat Statistik (2024) besarnya kontribusi kedua sektor tersebut menunjukkan bahwa sumber daya alam masih menjadi salah satu penggerak utama aktivitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, dalam penelitian ini kekayaan sumber

daya alam diproksikan melalui kontribusi sektor pertanian dan sektor pertambangan/penggalian yang tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masing-masing provinsi. Untuk melihat kondisi kekayaan sumber daya alam antarprovinsi, berikut disajikan 32 provinsi di Indonesia dengan nilai kekayaan sumber daya alamnya pada tahun 2024.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar1. 2
Presentase Provinsi dengan Kekayaan Sumber Daya Alam dan Angka Kemiskinannya

Pada Gambar 1.2, terlihat bahwa provinsi-provinsi dengan kekayaan sumber daya alam yang tinggi memiliki tingkat kemiskinan yang berbeda-beda. Sulawesi Barat sebagai provinsi dengan nilai kekayaan sumber daya alam tertinggi sebesar 48,32 masih memiliki tingkat kemiskinan sebesar 10,71 persen. Demikian pula Gorontalo yang memiliki nilai kekayaan sumber daya alam sebesar 38,40 masih

menghadapi tingkat kemiskinan sebesar 13,87 persen. Sebaliknya, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur yang juga memiliki kekayaan sumber daya alam tinggi justru memiliki tingkat kemiskinan yang relatif rendah, masing-masing sebesar 4,02 persen dan 5,51 persen. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tingginya kekayaan sumber daya alam tidak selalu diikuti oleh rendahnya tingkat kemiskinan. Dengan kata lain, keberadaan sumber daya alam yang melimpah belum tentu mampu memberikan manfaat ekonomi yang merata kepada seluruh masyarakat.

Selain kekayaan sumber daya alam, faktor lain yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi adalah kualitas sumber daya manusia. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia adalah rata-rata lama sekolah. Theodore dan Becker (1961) menjelaskan bahwa pendidikan merupakan investasi modal manusia yang mampu meningkatkan produktivitas, keterampilan, dan pendapatan individu. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka semakin besar peluang untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan hidup.

Peningkatan rata-rata lama sekolah di Indonesia menunjukkan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia dari tahun ke tahun. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan tingkat pendidikan antarprovinsi yang menyebabkan perbedaan kemampuan masyarakat dalam mengakses peluang ekonomi. Provinsi dengan rata-rata lama sekolah yang tinggi umumnya memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan provinsi dengan rata-rata lama sekolah yang rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peran penting

dalam mengurangi kemiskinan melalui peningkatan kualitas tenaga kerja dan produktivitas masyarakat. Kondisi ini konsisten dengan data Badan Pusat Statistik (2024) yang menunjukkan bahwa capaian rata-rata lama sekolah antarprovinsi di Indonesia masih bervariasi, serta sejalan dengan pandangan Hanushek dan Woessmann (2008) bahwa kualitas pendidikan yang lebih baik berperan penting dalam mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Faktor lain yang diduga memengaruhi tingkat kemiskinan adalah realisasi pengeluaran pemerintah. Keynes (1936) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan instrumen kebijakan fiskal yang dapat meningkatkan aktivitas ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Musgrave dan Musgrave (1989) juga menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki fungsi distribusi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan ekonomi.

Menurut Miar dan Yunani (2020) mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah khususnya dalam bentuk belanja pemerintah daerah, merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi tingkat kemiskinan. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), belanja pemerintah digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang terdiri atas belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasional mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, serta belanja bantuan sosial yang bertujuan mendukung penyelenggaraan pelayanan

publik dan memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Sementara itu, belanja modal diarahkan untuk pembangunan dan peningkatan aset tetap, seperti jalan, jembatan, irigasi, sekolah, rumah sakit, puskesmas, jaringan air bersih, dan berbagai sarana prasarana publik lainnya yang berperan dalam meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran untuk berbagai program pemberdayaan masyarakat, seperti pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pelatihan keterampilan tenaga kerja, bantuan permodalan, subsidi pada sektor tertentu, serta program perlindungan sosial yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan. Berbagai bentuk belanja tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas masyarakat, memperbaiki kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik (2022) perbedaan tersebut mencerminkan variasi kapasitas fiskal, jumlah penduduk, luas wilayah, serta kebutuhan pembangunan di masing-masing daerah, sehingga kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai program pembangunan dan penanggulangan kemiskinan juga berbeda-beda.

Menurut Nurias dkk. (2023) menyatakan bahwa besarnya belanja pemerintah tidak secara otomatis menjamin keberhasilan dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Efektivitas pengeluaran pemerintah sangat bergantung pada kualitas perencanaan, ketepatan sasaran program, efisiensi penggunaan anggaran, serta proporsi belanja yang dialokasikan pada sektor-sektor yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Belanja modal yang diarahkan pada

pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta menciptakan peluang ekonomi baru. Di sisi lain, belanja pada sektor pendidikan dan kesehatan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga produktivitas tenaga kerja menjadi lebih baik dan pendapatan masyarakat dapat meningkat. Selain itu, bantuan sosial dan program pemberdayaan ekonomi mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memperoleh sumber pendapatan yang lebih berkelanjutan. Sebaliknya, menurut

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, masih terdapat perbedaan baik dari segi indikator, ruang lingkup wilayah dan periode penelitian. Sachs dan Warner (2001) menemukan bahwa ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya alam berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi, sedangkan penelitian ini meneliti pengaruh rasio kontribusi PDRB sektor A (Pertanian) dan sektor B (Pertambangan dan Penggalian) terhadap angka kemiskinan. Perbedaan tersebut diduga disebabkan oleh perbedaan pengukuran variabel, dimana penelitian terdahulu menggunakan indikator sumber daya alam secara agregat, sedangkan penelitian ini menggunakan rasio kontribusi PDRB sektor A (Pertanian) dan sektor B (Pertambangan dan Penggalian) terhadap total PDRB sebagai proksi kekayaan sumber daya alam. Pada variabel pendidikan, Barro (2013) serta Hanushek dan Woessmann (2008) lebih menitikberatkan pada pengaruh pencapaian sekolah tingkat tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan penelitian ini menguji pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap angka kemiskinan. Pada variabel pengeluaran pemerintah, penelitian Misdawita dan Sari (2013), Fithri dan Kaluge (2017), Miar dan Yunani

(2020), serta Yusri (2021) umumnya menggunakan pengeluaran pemerintah sektoral atau wilayah penelitian yang terbatas, sedangkan penelitian ini menggunakan realisasi pengeluaran pemerintah secara keseluruhan pada 32 provinsi, sehingga lebih mampu melihat peran kebijakan fiskal secara umum. Penelitian Afonso, Schuknecht, dan Tanzi (2005) menggunakan indikator kinerja sektor publik dan efisiensi pemerintah sebagai variabel dependen, sedangkan penelitian ini menggunakan indikator tersebut sebagai variabel independen.

Selain perbedaan indikator dan model penelitian, penelitian ini juga dilakukan pada periode 2022–2024 yang merupakan masa pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19. Kondisi tersebut berbeda dengan sebagian besar penelitian terdahulu yang menggunakan data sebelum pandemi, sehingga hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih relevan mengenai pengaruh kekayaan sumber daya alam, pendidikan, dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan dalam kondisi ekonomi yang lebih aktual.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kekayaan sumber daya alam terhadap angka kemiskinan di Indonesia tahun 2022-2024?
2. Bagaimana pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap angka kemiskinan di Indonesia tahun 2022-2024?
3. Bagaimana pengaruh realisasi pengeluaran pemerintah terhadap angka kemiskinan di Indonesia tahun 2022-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh kekayaan sumber daya alam terhadap angka kemiskinan di Indonesia tahun 2022-2024.
2. Untuk menganalisis pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap angka kemiskinan di Indonesia tahun 2022-2024.
3. Untuk menganalisis pengaruh realisasi pengeluaran pemerintah terhadap angka kemiskinan di Indonesia tahun 2022-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, yaitu

1. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam upaya menurunkan angka kemiskinan melalui peningkatan rata-rata lama sekolah, optimalisasi pengeluaran pemerintah, dan pengelolaan kekayaan sumber daya alam di Indonesia.
2. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai pengaruh rata-rata lama sekolah, realisasi pengeluaran pemerintah, dan kekayaan sumber daya alam terhadap angka kemiskinan di Indonesia.
3. Dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti mengenai pengaruh rata-rata lama sekolah, realisasi pengeluaran pemerintah, dan kekayaan sumber daya alam terhadap angka kemiskinan di Indonesia.

1.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga bahwa kekayaan sumber daya alam berpengaruh negatif terhadap angka kemiskinan di Indonesia tahun 2022-2024.
2. Diduga bahwa rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif terhadap angka kemiskinan di Indonesia tahun 2022-2024.
3. Diduga bahwa realisasi pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap angka kemiskinan di Indonesia tahun 2022-2024.

1.6 Sistematika Penulisan

Rencana sistematika penulisan penelitian terdiri dari 5 bab, yaitu:

Bab I – Pendahuluan

Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta hipotesis penelitian.

Bab II – Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka terdiri dari teori dan penelitian pendahulu mengenai topik penelitian yang dibahas.

Bab III – Metode Penelitian

Metode Penelitian teridiri dari jenis dan sumber data, model dan alat analisis penelitian, serta defenisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV – Hasil dan Pembahasan

Hasil dan Pembahasan yaitu membahas hasil dari topik penelitian yang diteliti.

Bab V – Penutup

Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang sudah dilakukan.